

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Fockema, Andreae, *Kamus Hukum Ed 6*, (Bandung: Bina Cipta, 2001).

Kristina, Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Thafamedia, 2018).

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandat Maju*, (Bandung, 2003).

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Ed 5*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan ed 4*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 2002).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Humni, 2006).

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rasdakarya, 2012).

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2003.

Sunarto, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005).

Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan dan Delik-Delik Khusus Ed 3*, (Bogor: Politeia, 1999).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: BPFH-UNDIP, 2006).

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

Syed Husain Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 2000).

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Chalia Indonesia, 1996).

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013).

Jurnal

Hamilton Hart, Natasha, *AntiCorruption Strategies in Indonesia*, (Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2010), Volume 1, Nomor 37.

Natalia dan Luntungan, *Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, (Lex Crimen, 2013), Volume II, Nomor 2.

Saragih, Y.M, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Al'Adl, 2007), Volume IX, Nomor 1.

Zudan Arif Fakhrulloh, *Jurisprudence*, 2005, Volume 2, Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Website

Hukumonline.com. “Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa Dalam Menyidik Perkara Korupsi”.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/pertarungan-wewenang-polisi-dan-jaksa-dalam-menyidik-perkara-korupsi>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Hukumonline.com. “Siapa yang Berwenang Dalam Penyidikan Tipikor”.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1207/penyidikan-tindak-pidana-korupsi> . Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021